

Judul : Dewan Minta Pemerintah Beri Insentif Galangan  
Tanggal : Selasa, 13 November 2018  
Surat Kabar : Bisnis Indonesia  
Halaman : 9

## ► PENGUATAN INDUSTRI KAPAL

# Dewan Minta Pemerintah Beri Insentif Galangan

SURABAYA — Komisi V DPR RI meminta pemerintah untuk memberikan insentif dan pelatihan tenaga kerja perkapalan kepada galangan kapal terutama BUMN guna meningkatkan industri galangan kapal dalam negeri.

Anggota Komisi V DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengatakan industri galangan kapal saat ini perlu bantuan dari pemerintah agar memiliki kekuatan di tengah persaingan global.

"Pemerintah wajib mengupayakan galangan kapal seperti memberikan insentif-insentif khusus, misalnya bunga bank yang tidak tinggi untuk permodalan," katanya saat kunjungan Komisi V DPR RI di PT Dok dan Perkapalan Surabaya, Senin (12/11).

Selain itu, lanjutnya, galangan kapal perlu diberikan perpajakan yang lebih murah seperti yang dilakukan pemerintah Malaysia yang justru bukan negara kepulauan.

Dewan juga mendorong pemerintah untuk meningkatkan keahlian sumber daya manusia dengan program pelatihan sesuai dengan kebutuhan industri galangan.

"Pelatihan atau kursus untuk tenaga kerja oleh pemerintah ini sudah ada tetapi belum maksimal, padahal setiap bagian ada sertifikasi keahlian sendiri misalnya ahli mengelas pipa," katanya.

Bambang menambahkan, pemerintah juga perlu memiliki proteksi terhadap *cabotage* untuk melindungi industri maritim. Dengan begitu, industri maritim asing tidak boleh masuk ke Indonesia. "Yang terakhir, harus ada sinergi BUMN supaya saling diberdayakan," imbuhnya.

Lebih jauh, Komisi V DPR RI menolak rencana relokasi PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS) oleh PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III yang saat ini masih dalam kajian.

Menurut Bambang, pelabuhan dan dok perkapalan tidak boleh terpisah karena merupakan satu kesatuan dalam industri dan transportasi. "Port internasional itu tidak akan layak

untuk menjadi suatu *port* kalau tidak ada fasilitas galangannya. Saya tidak setuju kalau galangan dipindahkan, seharusnya Pelindo berterima kasih karena sudah disediakan [galangan] oleh perusahaan BUMN. Makanya relokasi tidak ada, kalau pengembangan boleh," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama DPS, Bambang Soendjaswono mengatakan rencana relokasi tersebut masih dalam tahap kajian sehingga belum diputuskan lokasi relokasi dan pengembangannya.

"Kajiannya belum jadi, sehingga kami belum bisa memberi informasi," katanya.

Pada Oktober lalu, Pelindo III melakukan MoU dengan DPS untuk melakukan rencana relokasi DPS yang saat ini berada di area kerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Menurut Direktur Utama Pelindo III, Doso Agung, relokasi tersebut dilakukan untuk memperluas area kerja operasional Pelindo yang mengacu pada rencana induk pelabuhan (RIP) Tanjung Perak yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.

Dalam RIP tersebut tidak ada lokasi docking (pemeliharaan) kapal di dalam area kerja Pelabuhan Tanjung Perak. Selain itu, pengembangan Pelabuhan Tanjung Perak juga mengacu pada arus barang yang semakin meningkat sehingga dibutuhkan lahan untuk memperluas area kerja operasional pelabuhan.

Menurut Pelindo III, relokasi tersebut juga menjadi langkah awal bagi kedua perusahaan untuk saling mendukung pengembangan usaha masing-masing perusahaan.

Setelah MoU tersebut, Pelindo III dan DPS bersama dalam satu tim untuk membuat kajian-kajian, baik kajian pemilihan lokasi DPS yang baru hingga kajian-kajian mengenai aspek bisnis lainnya.

Lebih lanjut, PT Dok dan Perkapalan Surabaya (Persero) atau DPS tahun depan akan menggarap sejumlah proyek pembangunan kapal sejalan dengan proyeksi perolehan nilai kontrak Rp400 miliar. (Peni Widarti)